

Laporan Tahun Kinerja 2018

*Sekretariat Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan*



Laporan Tahun Kinerja 2018

*Sekretariat Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan*



KATA PENGANTAR

Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Setditjen PKTL) merupakan unit organisasi yang memegang peran untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen. Dalam melaksanakan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Setditjen PKTL Tahun 2018, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Setditjen PKTL Tahun 2018 sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 61.391.499.761,- atau 89,49% dari total pagu anggaran Tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Setditjen PKTL serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2019
Sekretaris Ditjen PKTL,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 1 |
| 1.3. Sumber Daya Manusia | 3 |
| 1.4. Sarana dan Prasarana..... | 5 |
| 1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi..... | 6 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 7 |
| 2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019 | 7 |
| 2.2. Rencana Kerja Tahun 2018 | 8 |
| 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran | 9 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja | 9 |
| 2.5. Review Atas Dokumen Perencanaan | 11 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 12 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 12 |
| 3.1.1. Metode Pengukuran | 12 |
| 3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja..... | 13 |
| 3.2. Realisasi Anggaran..... | 49 |
| BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI | 50 |
| BAB V PENUTUP | 52 |
| LAMPIRAN | 53 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| <i>Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Setditjen PKTL</i> | <i>3</i> |
| <i>Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan</i> | <i>4</i> |
| <i>Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan</i> | <i>4</i> |
| <i>Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang</i> | <i>5</i> |
| <i>Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana</i> | <i>5</i> |
| <i>Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL</i> | <i>8</i> |
| <i>Tabel 7. Pagu Anggaran Tahun 2018</i> | <i>9</i> |
| <i>Tabel 8. Perjanjian Kinerja Setditjen PKTL</i> | <i>10</i> |
| <i>Tabel 9. Capaian Kinerja Tahun 2018</i> | <i>13</i> |
| <i>Tabel 10. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2018</i> | <i>14</i> |
| <i>Tabel 11. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2018</i> | <i>15</i> |
| <i>Tabel 12. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra</i> | <i>16</i> |
| <i>Tabel 13. Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Ditjen PKTL</i> | <i>44</i> |
| <i>Tabel 14. Rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2018</i> | <i>46</i> |
| <i>Tabel 15. Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2018</i> | <i>49</i> |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran strategis Setditjen PKTL dalam pelaksanaan **program planologi dan tata lingkungan** berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen. Dalam melaksanakan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Hal tersebut sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, disusunlah Laporan Kinerja Setditjen PKTL Tahun 2018.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja dilakukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen PKTL mengemban tugas **melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen**. Sebagai salah satu Unit Eselon II

yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PKTL, dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen PKTL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

fungsi

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

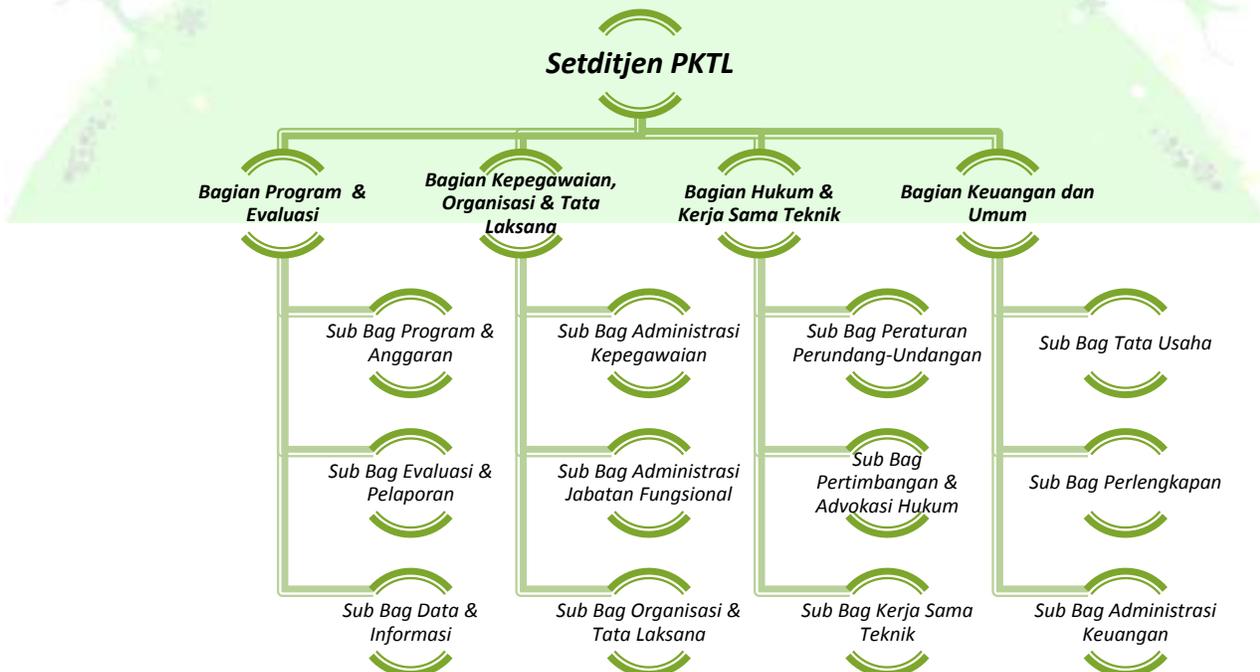
Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Ditjen.

Setditjen PKTL terdiri dari 4 (empat) Bagian/Unit Eselon III dan 12 (dua belas) Sub Bagian/Unit Eselon IV dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PKTL



Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Setditjen PKTL

| | | |
|---|--------|---|
| Bagian Program dan Evaluasi | Tugas | Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan. |
| | Fungsi | Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran. |
| | | Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Ditjen. |
| | | Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan. |
| Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Tugas | Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan |
| | Fungsi | Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian |
| | | Pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional |
| | | Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan |
| Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik | Tugas | Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri |
| | Fungsi | Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan |
| | | Penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum |
| | | Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri |
| Bagian Keuangan dan Umum | Tugas | melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan |
| | Fungsi | Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara |
| | | Pelaksanaan urusan administrasi keuangan |
| | | Pelaksanaan urusan perlengkapan |

1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setditjen PKTL sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 73 orang yang terdiri dari 41 laki-laki (56,17%) dan 32 perempuan (43,83%). Pegawai Setditjen PKTL tersebut tersebar pada empat bagian. Di antara jumlah tersebut, terdapat 4 pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar/Karya Siswa dan 1 pegawai diperbantukan ke unit organisasi lain. Komposisi pegawai berdasarkan golongan pangkat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

| Eselon III | IV | | | III | | | II | | | I | | | JUMLAH | | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | TOTAL |
| Sekretaris Ditjen PKTL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bagian Program & Evaluasi | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
| Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| Bagian Keuangan dan Umum | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 25 |
| JUMLAH | 7 | 5 | 12 | 29 | 25 | 54 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41 | 32 | 73 |

Dalam menjalankan roda organisasi, Setditjen PKTL dibantu 23 tenaga kontrak yang tersebar di seluruh bagian. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 73 orang, jumlah keseluruhan pegawai Setditjen PKTL sebanyak 96 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Eselon III | Status Pegawai | S3 | | S2 | | S1 | | DIII | | SLTA | | SLTP | | SD | | TOTAL | |
|---|----------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| | | Sekretaris Ditjen PKTL | PNS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bagian Program & Evaluasi | PNS | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| | Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | PNS | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| | Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik | PNS | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| | Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bagian Keuangan dan Umum | PNS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| | Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Jumlah per Status Pegawai | PNS | 0 | 1 | 12 | 7 | 15 | 18 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 32 |
| | Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 |
| TOTAL | PNS / Kontrak | 0 | 1 | 12 | 7 | 24 | 22 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 36 |

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Setditjen PKTL untuk mendukung pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan tahun 2018 (bergerak dan tidak bergerak) senilai Rp 94.644.292.929,- dengan rincian pada tabel 4.

Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang

| AKUN NERACA | | JUMLAH | | |
|---------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| KODE | URAIAN | NILAI BMN | AKM. PENYUSUTAN | NILAI NETTO |
| 117111 | Barang Konsumsi | 17.657.000 | 0 | 17.657.000 |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat | 0 | 0 | 0 |
| 117199 | Persediaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 131111 | Tanah | 67.502.736.000 | 0 | 67.502.736.000 |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 13.201.960.354 | 8.666.161.924 | 4.535.798.430 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 22.353.127.000 | 825.033.378 | 21.528.093.622 |
| 134113 | Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 135111 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 0 | 0 | 0 |
| 135121 | Aset tetap lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 136111 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 |
| 162151 | Software | 209.125.000 | 93.640.625 | 115.484.375 |
| 162161 | Lisensi | 0 | 0 | 0 |
| 162191 | Aset Tak Berwujud Lainnya | 53.400.000 | 0 | 53.400.000 |
| 166112 | Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan | 4.896.018.902 | 4.004.895.400 | 891.123.502 |
| JUMLAH | | 108.234.024.256 | 15.589.731.327 | 94.644.292.929 |

Catatan: Daftar posisi BMN di neraca per 31 Desember 2018

Jenis dan kondisi sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah sebagai berikut (penyajian data pada tingkat kelompok barang):

Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Kondisi Baik | Kondisi Rusak (Berat/Ringan) | Jumlah Seluruhnya | Keterangan* |
|----|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--|
| 1 | Tanah | 4.010 m ² | - | 4.010 m ² | |
| 2 | Gedung Bangunan | 3 | 1 | 4 | 1 unit bangunan yang berada di Dramaga, Bogor dihentikan penggunaannya dan dalam proses alih status penggunaannya. |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|--|
| 3 | Kendaraan Roda 4 | 30 unit | 4 Rusak Berat | 34 unit | Kondisi 4 unit mobil rusak berat dan dihentikan penggunaannya (dalam proses penghapusan). |
| 4 | Kendaraan Roda 2 | 12 unit | 3 unit | 15 unit | Kondisi 3 unit kendaraan roda dua rusak berat dan dihentikan penggunaannya (dalam proses penghapusan). |
| 5 | Peralatan & Mesin | 1.215 unit | 1.132 Rusak Berat | 2.347 unit | Sebanyak 1.132 unit peralatan mesin kondisinya rusak berat dan dihentikan penggunaannya untuk proses penghapusan. Proses penghapusan masih menyesuaikan data hasil inventarisasi ter-update. Di antara jumlah peralatan yang rusak tersebut, terdapat barang yang tidak ditemukan sesuai temuan BPK-RI sebanyak 21 unit. Proses selanjutnya atas barang yang tidak ditemukan masih menunggu rekomendasi dari BPK-RI. |

1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi

Dalam menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PKTL, pada tahun 2018 tidak ditemukan permasalahan yang berarti.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019

Tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015 – 2019 yaitu “Memastikan kawasan hutan yang mantap dan tata lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional”. Dalam mencapai sasaran Ditjen PKTL (Ditjen PKTL) secara keseluruhan, Setditjen PKTL mempunyai peran dalam mengembangkan kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan, melalui dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit organisasi/satuan kerja terutama melalui Intervensi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Regulasi/Kebijakan dan Kemitraan/Kerjasama.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran program Ditjen PKTL telah ditetapkan kegiatan Setditjen PKTL yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 % (A) di tahun 2019.

Penetapan kinerja tersebut bertujuan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek perencanaan program, kelembagaan, SDM, administrasi dan keuangan, serta kebijakan dan kerjasama pada Ditjen PKTL. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan ke depan.

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|--|---|---|
| Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal: SAKIP Dengan Nilai Minimal 78,00 (A) Di Tahun 2019 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 Point) |

2.2. Rencana Kerja Tahun 2018

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Setditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2018 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 77 poin**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, sasaran kegiatan Setditjen PKTL dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) unit kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Penyusunan/pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Pada awal tahun anggaran 2018, Setditjen PKTL mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 63.990.316.000,- (enam puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Alokasi anggaran tersebut mengalami penambahan sebesar Rp 4.614.871.000,- (empat milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) melalui revisi antar satker, sehingga pagu anggaran Setditjen PKTL menjadi Rp 68.605.187.000,- (enam puluh delapan milyar enam ratus lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Penambahan tersebut dilakukan pada belanja barang sebesar Rp 2.143.674.000,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp 4.338.700.000,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), namun untuk belanja pegawai terjadi pengurangan sebesar Rp.1.867.503.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah). Rincian perubahan anggaran tersebut disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Pagu Anggaran Tahun 2018

| Jenis Belanja | Pagu Awal (Rp) | Penambahan/Pengurangan (Rp) | Pagu Revisi (Rp) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Belanja Pegawai | 52.628.647.000 | -1.867.503.000 | 50,761,144.000 |
| Belanja Barang | 10.982.768.000 | +2.143.674.000 | 13.126.442.000 |
| Belanja Modal | 378.901.000 | +4.338.700.000 | 4.717.601.000 |
| Jumlah | 63.990.316.000 | +4.614.871.000 | 68.605.187.000 |

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Setditjen PKTL sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja satker. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Setditjen PKTL adalah "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 77 (A) di tahun 2018". Indikator kinerja sasaran tersebut

adalah 1) Nilai SAKIP 77 point di Tahun 2018, 2) Layanan internal (*overhead*) sebanyak satu layanan dan 3) Layanan perkantoran (1 layanan). Penjabaran dari perjanjian kinerja tersebut seperti tercantum pada Tabel 8 (Turunan Perjanjian Kinerja Terlampir).

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Setditjen PKTL

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|-----------|
| | Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 4 Dokumen |
| Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 6 Dokumen |
| | Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 3 Dokumen |
| | Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 1 Dokumen |
| Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen |
| | Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM | 1 Dokumen |
| | Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 5 Draft |
| Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum Pengembangan Kerja sama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 1 Dokumen |
| | Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 2 Dokumen |
| | Laporan SIMAK-BMN | 2 Laporan |
| Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum | Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 3 Judul |
| | Laporan Penyusunan TL-LHP | 1 Laporan |
| | Dokumen sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan | 5 Dokumen |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Layanan Internal (<i>overhead</i>) | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 1 Layanan |
| Layanan perkantoran | Layanan perkantoran | 12 Bulan |

2.5. Review Atas Dokumen Perencanaan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, penyajian laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai dilakukan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga target yang diacu sebagai tolok ukur capaian kinerja adalah target yang tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA). Berdasarkan perubahan alokasi anggaran yang terjadi, terdapat penambahan output pada sasaran “Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan”, yaitu Reviu Renstra Ditjen PKTL 2015-2019.

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target Awal | Penyesuaian Target |
|--|---|-------------|--------------------|
| Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 4 Dokumen | 5 Dokumen |

Penambahan keluaran terbesar terjadi pada *output* Layanan Internal (*overhead*) berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Metode Pengukuran

3.1.1.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

3.1.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

3.1.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja pada Setditjen PKTL menunjukkan bahwa capaian kinerja Setditjen PKTL Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan PK Setditjen PKTL Tahun 2018 adalah sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Tahun 2018

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Capaian | % |
|--|--|---------|---------|-----|
| Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 5 Dok. | 5 Dok. | 100 |
| | Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 6 Dok. | 6 Dok. | 100 |
| | Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 3 Dok. | 3 Dok. | 100 |
| Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 1 Dok. | 1 Dok. | 100 |
| | Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian | 1 Dok. | 1 Dok. | 100 |
| | Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM | 1 Dok. | 1 Dok. | 100 |
| Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 5 Draft | 5 Draft | 100 |
| | Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 1 Dok. | 1 Dok. | 100 |
| | Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 2 Dok. | 2 Dok. | 100 |
| | Laporan SIMAK-BMN | 2 Lap. | 2 Lap. | 100 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Capaian | % |
|---|---|-----------|-----------|------------|
| Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum | Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 3 Judul | 3 Judul | 100 |
| | Laporan Penyusunan TL-LHP | 1 Lap. | 1 Lap. | 100 |
| | Dokumen sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan | 5 Dok. | 5 Dok. | 100 |
| Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |
| Layanan perkantoran | Layanan perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | 100 |

3.1.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun 2018 suatu output dengan persentase capaian kinerja di tahun 2017. Efektivitas capaian kinerja tahun 2018 disajikan pada Tabel 10. Seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Tabel 10. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2018

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Tahun 2017 | % Capaian Tahun 2018 | Efektifitas Capaian Kinerja |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 100 | 1 |
| | Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 100 | 1 |
| | Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 100 | 1 |
| Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 100 | 1 |
| | Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian | 100 | 100 | 1 |
| | Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM | 100 | 100 | 1 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Tahun 2017 | % Capaian Tahun 2018 | Efektifitas Capaian Kinerja |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum Pengembangan Kerja sama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 100 | 1 |
| | Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 100 | 1 |
| | Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 100 | 1 |
| Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum | Laporan SIMAK-BMN | 100 | 100 | 1 |
| | Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 100 | 1 |
| | Laporan Penyusunan TL-LHP | 100 | 100 | 1 |
| | Dokumen sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan | 100 | 100 | 1 |
| Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 100 | 100 | 1 |
| Layanan perkantoran | Layanan perkantoran | 100 | 100 | 1 |
| Rata-rata Efektifitas Capaian Kinerja | | | | 1 |

3.1.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya. Seluruh sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1,11.

Tabel 11. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2018

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Fisik Tahun 2018 | % Capaian Keu. Tahun 2018 | Efisiensi Capaian Kinerja |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 78,23 | 1,28 |
| | Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 94,13 | 1,06 |
| | Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 98,52 | 1,02 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | % Capaian | Efisiensi Capaian Kinerja |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Fisik Tahun 2018 | Keu. Tahun 2018 | |
| Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 97,56 | 1,03 |
| | Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian | 100 | 91,95 | 1,09 |
| | Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM | 100 | 94,55 | 1,06 |
| Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum Pengembangan Kerja sama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 91,29 | 1,10 |
| | Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 90,79 | 1,10 |
| | Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 94,31 | 1,06 |
| Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum | Laporan SIMAK-BMN | 100 | 71,65 | 1,40 |
| | Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 100 | 96,41 | 1,04 |
| | Laporan Penyusunan TL-LHP | 100 | 91,02 | 1,10 |
| | Dokumen sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan | 100 | 93,27 | 1,07 |
| Layanan internal (<i>overhead</i>) | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 100 | 92,67 | 1,08 |
| Layanan perkantoran | Layanan perkantoran | 100 | 89,20 | 1,12 |
| Rata-rata Efisiensi Capaian Kinerja | | | | 1,11 |

3.1.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 12. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target 5 Tahun | Satuan | Realisasi Per Tahun | | | | Total Realisasi s.d Tahun 2018 | % Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun |
|---|---|----------------|--------|---------------------|------|------|------|--------------------------------|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan | Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 22 | Judul | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 81,82 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|-------|---|---|---|---|----|--------|
| Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 29 | Judul | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 82,76 |
| | Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 15 | Judul | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 80,00 |
| Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 5 | Judul | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,00 |
| | Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian | 5 | Judul | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,00 |
| | Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM | 5 | Judul | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,00 |
| Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum Pengembangan Kerja sama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 23 | Draft | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 | 78,26 |
| | Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 13 | Judul | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 46,15 |
| | Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 17 | Judul | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 52,94 |
| Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum | Laporan SIMAK-BMN | 15 | Judul | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 73,33 |
| | Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 15 | Judul | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---|---|---|-------|
| Laporan Penyusunan TL-LHP | 5 | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,00 |
| Dokumen sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan | 5 | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,00 |
| Rata-rata Capaian Renstra | | | | | | | | 57,74 |

Secara umum pelaksanaan kegiatan Lingkup Setditjen PKTL telah sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan. Namun terdapat dua indikator kinerja dengan tingkat capaian yang relatif masih rendah, yaitu Penyusunan Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Penyusunan Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Permasalahan keduanya sama, yaitu karena terdapat komponen kegiatan yang pada awalnya direncanakan di dalam Renstra, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

3.1.2.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Setditjen PKTL berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan dasar penilaian kinerja kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan” adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan minimal 77,00 di tahun 2018.

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan Setditjen PKTL melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan dengan merealisasikan 15 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, antara lain:

Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan belanja negara sangat penting, mendesak, dan krusial untuk dilakukan. Sinergi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan kebutuhan mutlak dalam pengelolaan Keuangan Negara. Kementerian Keuangan memandang pengelolaan APBN secara umum masih belum efektif, efisien, optimal dan produktif. Di tengah kondisi umum seperti ini, sistem perencanaan dan penganggaran yang dibangun Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus diupayakan menuju perbaikan dalam proses pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya. Perbaikan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek fokus pada prioritas, transparansi dalam alokasi pendanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif, dan informasi kinerja yang tegas dan jelas sebagai dasar penyusunan anggaran.

Penyusunan dokumen rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 meliputi 5 kegiatan utama yang merupakan satu kesatuan proses yang saling terkait dan akan menentukan arah kebijakan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depannya, dimana pada tahun 2018 terdapat penambahan

output, sehingga keseluruhan kegiatannya adalah : Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018; Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019; Penyusunan Standar Kegiatan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019; dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2019 (RKA-K/L) dan Reviu Renstra Ditjen PKTL 2015-2019. Reviu Renstra ini mendesak untuk dilaksanakan seiring dinamika kebijakan yang terjadi selama kurun waktu pelaksanaan Renstra. Hasil (outcome) penting atas tercapainya seluruh output sasaran kinerja ini adalah rencana kegiatan dan anggaran yang tersusun menjadi acuan bagi seluruh satker pusat dan UPT daerah dalam penyusunan kegiatan dan anggaran. Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2018 secara fisik dapat direalisasikan 100%.

Penyusunan dokumen rencana di tahun 2018 dimulai dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018. . Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 telah ditetapkan Perjanjian melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.1/PKTL/SETDIT/KEU.1/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2018. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang disusun pada tahun 2018 berisi sasaran yang telah teranggarkan dalam dokumen RKA-K/L yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara berjenjang, satker lingkup Ditjen PKTL juga menyusun Perjanjian Kinerja. Pada lingkup satker Setditjen PKTL Perjanjian Kinerja telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Ditjen PKTL Nomor: P. 1/SETDIT/PROEV/KEU.1/2/2018 tentang Perjanjian Kinerja Setditjen PKTL Tahun 2018

Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018. Renja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan bagi satker di bawahnya dalam penyusunan perencanaan kegiatan, diantaranya oleh satker Setditjen PKTL yang ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Ditjen PKTL Nomor: P.7/SETDIT/PROEV/KUM.1/12/2018 tentang Rencana Kerja Setditjen PKTL Tahun 2019.

Sebagai dokumen pendukung penyusunan program dan kebijakan anggaran, telah ditetapkan Dokumen Standar Kegiatan dan Biaya Tahun 2019 melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.12/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019

Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen PKTL Tahun 2019 tersebut ini merupakan acuan bagi seluruh satker lingkup Ditjen PKTL baik pusat maupun daerah (UPT) dalam penyusunan RKA-K/L pada tahapan berikutnya..

Proses Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019 dilaksanakan secara bersama instansi terkait, baik internal Kementerian LHK (Itjen dan Biro Perencanaan) dan eksternal dengan KemenPPN/Bappenas

dan DJA Kemenkeu. Dalam lingkup Ditjen PKTL, dilakukan pematangan perencanaan kegiatan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang melibatkan seluruh satuan kerja baik pusat maupun daerah (UPT).

Hasil akhir dari Proses Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019 adalah diterbitkannya Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-029.06-0/2019, tanggal 5 Desember 2018.

Beberapa kondisi yang ada menunjang pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana dan Anggaran adalah dipergunakannya aplikasi KRISNA dalam penyusunan kegiatan mulai aktif sejak tahun 2017 serta penelaahan online melalui aplikasi satu DJA yang meningkatkan efisiensi dan kualitas monitoring serta konsistensi dan keseragaman data.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Renstra dan Renja Ditjen PKTL, pada tahun 2018 dilaksanakan Reviu terhadap Renstra dan Renja. Reviu yang dilaksanakan untuk menyelaraskan antara kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam dokumen renstra dengan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja kurun waktu 2015 – 2019. Adapun hasil reviu Renstra tersebut adalah diakomodirnya beberapa kegiatan, yaitu : Pelepasan kawasan hutan untuk TORA dan seluruh *output* pendukungnya; Penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target TORA; *Output-output* baru untuk mendukung KPH; Penjaminan kualitas KLHS RTRLN dan RZWP3K; dan Inventarisasi dan verifikasi serta tata batas dalam rangka TORA.

Gambar 2. Rapat Koordinasi Teknis Ditjen PKTL Tahun 2018 di Bogor



Keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dengan tercapainya seluruh output fisik berkaitan erat dengan pemenuhan pembiayaan kegiatan, pemenuhan

kebutuhan SDM lingkup setditjen PKTL serta pemenuhan sarana dan prasarana menjadi pendukung efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, dukungan dengan mitra kerja dalam bentuk koordinasi, konsultasi yang terjalin dengan KemenPPN/Bappenas dan DJA Kemenkeu sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penggunaan anggaran khususnya dalam pelaksanaan revisi.

Tantangan yang dihadapi berupa perubahan arah kebijakan pada pertengahan periode tahun Renstra yang belum dilengkapi dengan payung hukum yang kuat mengakibatkan terkendalanya eksekusi pelaksanaan kegiatan. Kendala juga masih ditemui terkait kebutuhan basis data dan informasi yang akan sangat menentukan target dan standar pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

Upaya perbaikan ke depan diperlukan berupa dukungan regulasi dan koordinasi dalam pelaksanaan revisi kegiatan dan anggaran agar dapat terkoordinasi dan terintegrasi dengan Sekretariat di Pusat, khususnya pelaksanaan revisi dengan melibatkan Prioritas Nasional. Selain itu, diperlukan pembinaan teknis terhadap penanggung jawab dari operator/petugas perencanaan program dan anggaran, khususnya dalam rangka mensosialisasikan dan penyamaan persepsi atas aturan-aturan baru dalam bidang perencanaan program dan anggaran.

Kegiatan penyusunan *Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan* merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2018 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penyusunan *Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan* awalnya sebesar Rp 786.164.000 dan mendapatkan tambahan menjadi Rp 1.777.951.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.390.853.321,- (78,23%).

Berdasarkan perencanaan awal, tambahan anggaran sebesar Rp 991.787.000,- tersebut direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dalam waktu 3 bulan (Oktober – Desember). Akan tetapi, DIPA Revisi baru terbit pada 31 Oktober 2018 sehingga waktu pelaksanaan kegiatan hasil revisi hanya tersisa kurang dari 2 Bulan. Oleh karena itu, harus dilakukan redesain pelaksanaan kegiatan yang diantaranya harus mengesampingkan detail-detail yang sulit direalisasikan keuangannya tanpa menghilangkan substansi untuk pencapaian outputnya.

Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen. Monitoring merupakan suatu aktifitas pengawasan dan pengendalian yang berfungsi untuk memastikan proses pelaksanaan suatu kegiatan/program telah sesuai dengan yang direncanakan dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan suatu aktifitas untuk menilai tingkat kinerja yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Tingkat kinerja diukur dengan pendekatan indikator kinerja seperti *input*, *output*, *outcome* untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan tingkat capaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan.

Penyajian laporan yang baik memegang peran penting dalam berputarnya roda organisasi. Penyajian laporan dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana akan berjalan maksimal apabila didukung dengan laporan yang berkualitas, sehingga proses yang berjalan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program. Kondisi tersebut merupakan *outcomes* utama atas sasaran kinerja kegiatan ini.

Di dalam pelaksanaannya, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Untuk dapat menghasilkan laporan tingkat Eselon I yang baik, peran seluruh satker dalam menyuplai data pendukung memegang peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas pelaporan terus diupayakan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PKTL Nomor : P. 8/PKTL/SETDIT/KEU.5/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Lingkup Ditjen PKTL. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterbitkannya peraturan ini adalah terwujudnya sistem pelaporan yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan yang akurat, lengkap, jelas, tepat waktu dan *legitimate*, sehingga relevan dan memadai untuk digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi dan bahan masukan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran serta Penyajian Kinerja Bidang PKTL Tahun 2018 terdiri dari 6 kegiatan pokok antara lain: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran; Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKTL; Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PKTL; Evaluasi Rencana Kerja (Renja); Monitoring Pelaksanaan Renaksi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh kegiatan ini telah **terrealisasi 100%** pada Tahun 2018.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas pelaksanaan RKA-K/L atau DIPA agar sejalan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Selain itu, dilakukan juga rapat bulanan yang bersifat rutin untuk membahas berbagai langkah tindak lanjut atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas fungsi. Monitoring atas perkembangan kegiatan yang berjalan juga dipantau secara *on line* oleh Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran) dan BAPPENAS. Setiap satker melakukan pembaruan data atas progres pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi.

Pada tahun 2018 telah disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 Ditjen PKTL dan tingkat satker (Setditjen PKTL). LKj atau yang sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKj Ditjen PKTL adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK atas LKj Ditjen PKTL dan LKj

Setditjen PKTL, tidak ada rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan pada kedua dokumen tersebut.

Gambar 3. Rapat Pembahasan Penyusunan laporan Tahunan Lingkup Ditjen PKTL



Evaluasi Renja merupakan penjabaran pelaksanaan seluruh rencana yang telah tercantum dalam Renja dan membandingkannya dengan pelaksanaan kegiatan dalam dokumen DIPA. Dokumen ini disusun untuk mengevaluasi tingkat kesinkronan antara Renja dengan pengimplementasinya di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Selain itu, evaluasi ini dilakukan sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan Renja periode berikutnya.

Terdapat lima Rencana Aksi yang dipantau pada tahun 2018, yaitu Rencana Aksi HAM, Rencana Aksi Reforma Agraria, Rencana Aksi Pelaksanaan Inpres No 9 tahun 2017 tentang percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta 2018 dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2018. Berdasarkan laporan yang telah dihimpun, target yang dapat tercapai antara lain: 1) Terlaksananya diseminasi kepada aparatur pemerintah dari kementerian dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; 2) Terlaksananya Review Kelayakan dan Terjaminnya Kualitas Analisis Lingkungan Bagi Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Zona Pesisir; 3) Penyelesaian Peta Hutan Adat skala 1:50.000; 4) Update Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR) skala 1:50.000; 5) Update Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus skala 1:50.000; 6) Updating Peta Penetapan Kawasan Hutan (Hasil Tata Batas) minimal pada skala 1 : 50.000; 7) Penyelesaian Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA/HT/RE) minimal pada skala 1:50.000; 8) Update Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000 untuk 34 provinsi; 9) Penyelesaian Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000, 10) Update Peta Penunjukan Kawasan Hutan skala 1:250.000 dan 11) Penyelesaian Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000.

Untuk target penyediaan kawasan hutan yang telah dilepaskan sebagai sumber TORA dengan target seluas 1.630.421 ha dalam Rencana Aksi Reforma Agraria dapat direalisasikan seluas 1.677.098 ha. Namun demikian, realisasi dalam bentuk SK pelepasan kawasan hutan baru seluas 268.105 ha, sedangkan sisanya terdiri dari hasil penelitian tim terpadu HPK Tidak Produktif 1.010.881 ha, hasil inventarisasi dan verifikasi 358.883 ha, dan pencadangan pencetakan sawah baru 39.229 ha.

Pelaksanaan Rencana Aksi Pelaksanaan Inpres No 9 tahun 2017 tentang percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat masih berkaitan dengan implementasi penyediaan TORA. Target yang ditetapkan adalah Tersedianya Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan dan dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA. Target ini tidak dapat tercapai. Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan penyelesaian atas usulan TORA dari Gubernur yang ditetapkan oleh Menko Perekonomian. Hingga berakhirnya tahun anggaran, keputusan tersebut belum terbit, sehingga penataan batas belum dapat dilaksanakan.

Gambar 4. Rapat Pembahasan Penyusunan laporan Tahunan Lingkup Ditjen PKTL



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dalam mengawal penerapannya di tingkat satker, setiap Eselon I bertugas

melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap Satker lingkup unit kerjanya. Pembinaan yang dimaksud antara lain berupa bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke Satker UPT yang diawali dengan penelaahan dokumen penyelenggaraan SPIP yang tersedia, disertai dengan pemberian arahan, masukan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban (pelaporan). Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap ketertiban penyampaian Desain Penyelenggaraan SPIP, Laporan Triwulan, serta Laporan Tahunan dari Satker Pusat maupun Satker UPT lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2018, sebagian besar satker lingkup Ditjen PKTL telah menerapkan SPIP di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP dengan nilai 3,12 (terdefinisi). Nilai ini menempatkan Ditjen PKTL pada peringkat ketiga dengan nilai tertinggi di tingkat KLHK, di bawah Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi. Upaya perbaikan dalam implementasi SPIP terus diupayakan. Tantangan utama pelaksanaannya adalah mentransformasikan anggapan bahwa SPIP merupakan kewajiban menjadi suatu kebutuhan.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran serta Penyajian Kinerja Bidang PKTL Tahun 2018 sebesar Rp 652.041.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 613.797.801,-. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan, belanja perjalanan biasa dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran serta Penyajian Kinerja Bidang PKTL merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2018 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya, yaitu 6 dokumen setiap tahunnya.

Dukungan seluruh satker Lingkup Ditjen PKTL merupakan unsur penunjang utama tercapainya sasaran kinerja ini. Ketaatan dalam penyampaian laporan dan berbagai kebutuhan data terkait proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tetap menjaga kualitas dan validitas data sangat menentukan kualitas hasil evaluasi yang diperoleh. Hasil evaluasi inilah yang menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan yang relevan sehingga proses yang berjalan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program.

Sebagai langkah untuk perbaikan ke depannya, pada Tahun 2019 akan dibangun sistem informasi pelaporan untuk mengintegrasikan seluruh laporan dari Satker. Sistem informasi ini berbasis web yang dirancang untuk dapat menyimpan data dan informasi laporan ke dalam database. Sistem dapat menyajikan data dan informasi laporan serta dapat *membackup* dan

merestore data dan informasi yang sudah tersimpan. Tujuan utama dibangunnya sistem ini adalah untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat dan akuntabel secara cepat.

Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Penyusunan data dan informasi, statistik, dan kehumasan planologi kehutanan dan tata lingkungan Tahun 2018 meliputi 6 kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan; Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta Tindak Lanjut Menteri; Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017, serta Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018. Outcomes utama kegiatan ini adalah terpublikasikannya kebijakan dan hasil-hasil kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 melalui media cetak (buku, Buletin, leaflet, poster) dan elektronik (website) serta pameran sebagai bahan referensi bagi berbagai pihak yang membutuhkannya.

Kegiatan Kehumasan menjadi bagian penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat atau stakeholder baik di pusat maupun daerah terkait kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan Ditjen PKTL. Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dilaksanakan diantaranya meliputi keikutsertaan pada kegiatan pameran; pembuatan leaflet, *motion grafis/ explainer grafis*, stiker, dan poster; dan koordinasi dengan unit kerja di pusat maupun di daerah dalam rangka peliputan kegiatan dan pelaksanaan kunjungan kerja DPR RI.

Partisipasi Ditjen PKTL dalam agenda pameran antara lain: Indofest, pada tanggal 3-6 Mei 2018 di JCC Convention Hall Senayan, Jakarta; Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di Prambanan, Yogyakarta; Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, pada tanggal 19-21 Juli 2018 di JCC Convention Hall Senayan, Jakarta; Pameran dalam rangka Indonesian Climate Change Forum and Expo pada tanggal 17-19 Oktober 2018 di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan; Pameran dalam rangka *Soft Launching of The Interim ITPC Secretariat* pada tanggal 30 Oktober 2018, di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta; serta Pameran dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GN-PDAS) di persemaian permanen Purwakarta pada tanggal 28-29 Desember 2018.

Gambar 5. Indofest, pada tanggal 3-6 Mei 2018 di JCC Convention Hall Senayan



Kegiatan Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan kegiatan lanjutan yang dimulai sejak Tahun 2005. Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi kebutuhan media penyaluran informasi keplanologian kehutanan dan tata lingkungan serta pengembangan kompetensi pengetahuan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan yang sangat terkait dengan dinamika pembangunan. Hasil dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan perencanaan melalui media buletin yang sekaligus menjadi media sosialisasi perkembangan pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas, serta sebagai wadah pengembangan profesi fungsional dan staf di

bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Selama Tahun 2018, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Planolog.

Pada kurun waktu Januari s/d Desember 2018, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Menteri LHK dengan Komisi IV DPR RI dengan materi menyangkut tugas dan fungsi Ditjen PKTL sebanyak 1 (satu) kali, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Komisi IV DPR RI sebanyak 8 (delapan) kali, dengan Komisi VII DPR RI sebanyak 7 (tujuh) kali, serta dengan DPD RI sebanyak 2 (dua) kali.

Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan media penyebarluasan informasi mengenai Teknologi Informasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan media penyaluran kompetensi pengetahuan teknologi informasi serta wacana pengembangannya. Hasil dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan penyusunan buletin teknologi informasi planologi kehutanan dan tata lingkungan adalah terfasilitasinya proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan teknologi informasi tenaga fungsional dan staf di lingkup Ditjen PKTL dan sekaligus menjadi media sosialisasi perkembangan teknologi informasi keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas. Ditjen PKTL telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan pada Tahun 2018.

Penyusunan Buku Statistik Bidang PKTL Tahun 2017 merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi yang diperoleh dari Unit Eselon II Lingkup Ditjen PKTL serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan yang disajikan secara berkala setiap tahun.

Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen PKTL Tahun 2018 adalah salah satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dimaksudkan untuk memenuhi informasi terkait kegiatan dan pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan yang akurat dan mutakhir pada tahun berjalan, dalam rangka pelayanan data dan informasi kepada. Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah diterbitkan pada bulan Desember 2018.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh proses penyusunan Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan PKTL Tahun 2018 sebesar Rp 723.159.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 712.485.835,-. Kegiatan ini merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Penganggaran pada Tahun Anggaran 2018 lebih besar dibandingkan pada Tahun Anggaran 2017, karena terdapat tambahan anggaran pada penyelenggaraan kegiatan kehumasan dalam rangka keikutsertaan pada pameran pencaanangan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS).

Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2018 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya, yaitu 3 dokumen setiap tahunnya.

Gambar 6. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR-RI



Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Pada tahun 2018 Setditjen PKTL mempunyai kegiatan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 433.806.000,- untuk membiayai sub kegiatan Penyempurnaan prosedur kerja Ditjen PKTL; Penyempurnaan analisis jabatan beban kerja dan peta jabatan Ditjen PKTL; Penguatan kelembagaan Ditjen PKTL; dan Bimbingan teknis penggunaan aplikasi E-kinerja Ditjen PKTL.

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)/prosedur kerja pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena prosedur kerja adalah pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi. Selain itu, SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor P.65/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka pada tingkat unit Eselon I perlu juga ditetapkan peraturan yang mengatur proses bisnis pada unit tersebut. Pada tahun 2018, Direktur Jenderal PKTL telah menetapkan Peraturan Ditjen PKTL nomor P.3/PKTL/Setdit.OTL.2/3/2018 tentang Proses Bisnis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, proses bisnis dijabarkan ke dalam prosedur kerja (SOP), maka Prosedur Kerja lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah disusun dan disahkan melalui Peraturan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.8/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 perlu dicermati dan disempurnakan. Pada tahun 2018 kegiatan penyempurnaan prosedur kerja lingkup Ditjen PKTL diarahkan pada kegiatan sinkronisasi antara Prosedur Kerja dan Proses Bisnis lingkup Ditjen PKTL. Output dari kegiatan ini adalah dokumen prosedur kerja hasil sinkronisasi antara antara Prosedur Kerja dan Proses Bisnis lingkup Ditjen PKTL.

Melalui penyempurnaan prosedur kerja diharapkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, dapat ditemukan penyebabnya dan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan telah memiliki dan dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah. Output yang dihasilkan pada Tahun 2018 berupa Dokumen Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen PKTL (Pusat) dan draft Prosedur Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang akan didampingi penyempurnaannya pada tahun 2019.

Pada Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa "pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja. Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP serta stempel/cap instansi." Statement ini bermakna bahwa penyusunan prosedur kerja lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan menjadi tanggung jawab BPKH, sedangkan Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana hanya mempunyai kewenangan dalam hal koordinasi, fasilitasi dan asistensi agar prosedur kerja yang dihasilkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masing-masing BPKH.

Selain penyempurnaan prosedur kerja, sebuah organisasi juga memerlukan analisa jabatan dan perhitungan analisa beban kerja yang cermat agar tercipta organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Perhitungan analisis Beban Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK. 415/MENLHK/SETJEN/OTL.2/9/2018 tentang Hasil Analisis Beban Kerja lingkup KLHK. Namun, karena konsep ABK dimaksud telah disusun sejak tahun 2017 dan terjadi dinamika kepegawaian dan kebutuhan pegawai lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akibat pensiun, alih tugas dan penambahan beban kerja, maka Ditjen PKTL kembali menyusun ABK lingkup Ditjen PKTL pada tahun 2018 dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini sebagai usulan revisi terhadap Keputusan Menteri LHK No. SK. 415/MENLHK/ SETJEN/OTL.2/9/2018.

Kegiatan penguatan kelembagaan dilakukan dalam rangka membentuk kelembagaan Ditjen PKTL yang dapat mendukung perkembangan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penguatan kelembagaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 diwujudkan dalam

bentuk: 1) Penyusunan Proses Bisnis; 2) Evaluasi pelaksanaan penerapan aplikasi e-kinerja lingkup Ditjen PKTL; 3) Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi E- Kinerja; dan 4) Optimalisasi Fungsi Organisasi melalui Pembangunan Model Monitoring Effisiensi Fungsi Organisasi.

Pengukuran kinerja melalui aplikasi e-kinerja mulai disosialisasikan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi pada tahun 2017 dan telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penyusunan SKP secara *cascading* dan Penerapan Aplikasi E-Kinerja pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, Biro Kepegawaian dan Organisasi menghimbau kepada seluruh pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan uji coba pelaksanaan pengukuran e-kinerja dalam 2 periode yaitu periode 1 bulan Juli – September 2017 dan periode ke-2 bulan Oktober- Desember 2017, dan direncanakan akan dilaksanakan secara efektif pada awal tahun 2018 (bulan Januari). Namun kemudian uji coba pelaksanaan pengukuran e-kinerja kemudian diperpanjang kembali hingga bulan Juli 2018.

Berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.12/Setjen/Ropeg/Peg.3/6/2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Kinerja di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan bahwa mulai bulan Agustus 2018, setiap pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwajibkan untuk melaporkan capaian kerja harian (baik manual maupun melalui aplikasi), dan apabila tidak melaporkan akan dikenai sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%.

Mengingat dampak yang cukup besar bagi pegawai lingkup Ditjen PKTL, maka dilaksanakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-kinerja pada tanggal 30-31 Oktober 2018 yang melibatkan 125 peserta yang berasal dari pusat dan BPKH. Dalam Bimtek juga dipaparkan materi terkait Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dalam rangka Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional, mengingat sebagian besar kepala sub bagian Tata Usaha baik Pusat maupun BPKH hadir dalam acara dimaksud.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTL secara ber-dayaguna dan berhasilguna serta untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalisme pegawai Ditjen PKTL pusat dan daerah di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian/ kepengurusan umum.

Untuk mendukung sasaran strategis “pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian”, pada Tahun 2018 telah dilaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Pembinaan aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan dan Peningkatan Kapastias dan Kualitas SDM Ditjen PKTL.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Administrasi kepegawaian mencakup proses manajemen PNS, mutasi, promosi, disiplin pegawai, kenaikan pangkat/jabatan, pensiun, kenaikan gaji berkala, dan kesejahteraan pegawai. Dari proses tersebut diperoleh hasil antara lain: terwujudnya *bazzeting* pegawai setiap tahun; terwujudnya DUK (Daftar Usul

Kepangkatan) tiap tahun; pengusulan pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dalam rangka pemenuhan karier dan kesejahteraan pegawai tiap periode; pengusulan formasi pegawai; dan terbarukannya data SIMPEG. Keseluruhan proses ini akan berdampak pada layanan kepegawaian

Pembinaan pegawai dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018 yang dihadiri oleh seluruh pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk lebih memperkuat komitmen dan tekad, guna lebih meningkatkan jiwa korsa jajaran Ditjen PKTL dalam mendukung kinerja dalam rangka mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Pembinaan merupakan upaya preventif untuk mengurangi tindak tidak produktif pegawai dan sifat indisiplin pegawai. Pembinaan secara berkelanjutan akan berdampak positif terhadap kinerja pegawai

Selain itu, terdapat kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan dan Peningkatan Kapastias dan Kualitas SDM Ditjen PKTL pada tanggal 24 Agustus 2018 yang dihadiri oleh 70 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan baru dan menyatukan persepsi dalam hal pengambilan kebijakan terkait administrasi kepegawaian. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemutakhiran data SIMPEG pada Pusat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan untuk meningkatkan akurasi, relevansi dan aktualisasi data dan informasi kepegawaian dalam rangka pembinaan, pengelolaan dan pelayanan bidang kepegawaian secara efisien dan efektif. Updating simpeg sangat dibutuhkan untuk dukungan kondisi SDM terhadap program Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pembinaan dan Peningkatan Kapastias dan Kualitas SDM Ditjen PKTL merupakan salah satu cara untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta Meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk kegairahan kerja. Peningkatan Kualitas SDM akan sangat mendukung dalam proses pencapaian tujuan untuk pemantapan kawasan hutan. Dengan SDM yang mencukupi dan berkualitas akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut. SDM yang berkualitas dan cukup diharapkan bekerja profesional untuk menghasilkan cara dan metode yang terbaru dalam mencapai tujuan.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tahun 2018 sebesar Rp 1.196.524.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.100.157.120,-. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan, belanja perjalanan biasa dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2018 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya, yaitu 1 dokumen setiap tahunnya.

Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM

Kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan proses pencapaian tujuan sebuah organisasi. Peningkatan kualitas SDM dilakukan untuk mewujudkan pegawai yang mampu bekerja secara

profesional dan kreatif dalam memperbaharui metode dalam mencapai tujuan. Dengan jumlah SDM yang mencukupi dan memiliki kualifikasi yang diperlukan akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, upaya pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan peningkatan kualitas SDM pada Tahun 2018 dilakukan dengan pelaksanaan 2 (kegiatan) kegiatan, yaitu: Penilaian Angka Kredit Jafung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Penataan administrasi jabatan fungsional dilakukan dengan bimbingan teknis penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) bagi pejabat fungsional tertentu dan rapat penilaian DUPAK untuk proses penerbitan PAK dan HPAK. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbitnya PAK dan HPAK setiap periode penilaian dan tertibnya pengusulan dan penilaian DUPAK setiap periode penilaian dan sebagai rekomendasi bagi pejabat fungsional untuk diangkat dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat.

Gambar 7. Presentasi Karyasiswa



Pengelolaan Pengembangan Pegawai dilakukan baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan lain seperti peningkatan kualitas SDM. Pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang memperoleh ijin Tugas Belajar berjumlah 8 (Delapan) orang baik dipusat maupun BPKH. Sedangkan jumlah pegawai yang memperoleh ijin belajar berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari pegawai BPKH. Pegawai yang mengikuti ujian dinas berjumlah 9 (Sembilan) orang dan lulus ujian dinas berjumlah 4 (empat) orang. Pada Tahun 2018 terhadap Pegawai yang telah selesai Tugas Belajar S2 dilaksanakan presentasi Karyasiswa di Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Pusat berjumlah 7 orang.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan peningkatan kualitas SDM Tahun 2018 sebesar Rp 455.960.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 431.110.562,-. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2018 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya, yaitu 1 dokumen setiap tahunnya (Capaian terhadap Renstra 80%).

Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dalam menunjang pemantapan kawasan hutan. Secara umum, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan disusun/ditetapkannya peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilaksanakan dengan tahapan: pembahasan materi di internal Ditjen PKTL, menghimpun masukan dari daerah, membahas materi lintas Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pembahasan dengan Instansi terkait dan pakar/tenaga ahli.

Tahun 2018 telah dibahas/disusun/ditetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria;
3. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;
4. Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/Kum.1/11/2018 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.5/PKTL/SETDIT/KUM.1/8/2018 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Terpadu Dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Tidak Produktif Untuk Sumber Tanah Obyek Agraria (TORA).

Untuk memberikan persepsi yang sama dalam implemmentasi peraturan yang telah ditetapkan, pada Tahun 2018 telah dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dengan peserta yang berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Wilayah I-XXII dan Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, pada tahun 2018 juga dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Strategis Pemerintah yaitu:

1. Focus Group Discussion tentang Penyusunan Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan;
2. Focus Group Discussion Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terkait Tindak Lanjut Inpres Nomor 8 Tahun 2018.

Kedua tahapan proses tersebut memegang peran penting bagi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja.

Hambatan utama dalam pencapaian sasaran kinerja kegiatan ini adalah sulitnya mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi hasil kajian hukum dan lambatnya penyelesaian kajian atau telaahan hukum terhadap permasalahan. Untuk meminimalisir hambatan ini, koordinasi dengan unit kerja lain dilakukan secara intensif dengan memberikan batasan waktu tertentu.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan penyusunan draft perundang-undangan bidang PKTL Tahun 2018 sebesar Rp 570.040.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 520.390.222,-.

Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Ditjen PKTL bertanggung jawab dalam terwujudnya kemantapan prakondisi pengelolaan hutan. Kemantapan prakondisi pengelolaan hutan meliputi kemantapan status dan fungsi kawasan hutan. Dalam pelaksanaan pemantapan prakondisi pengelolaan hutan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama terkait dengan status hukum kawasan hutan.

Penguasaan lahan oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak sesuai menimbulkan konflik horizontal, berakar dari permasalahan tersebut perlu langkah tindak lanjut dalam menginventarisasi permasalahan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Permasalahan lain yang terjadi di dalam/sekitar kawasan hutan terkait dengan penataan batas, status hukum dan fungsi kawasan, tumpang tindih kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan serta aktifitas lain yang berdampak hukum.

Dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan maupun di sekitar kawasan hutan yang merupakan *outcomes* utama dari sasaran kinerja kegiatan ini, pada Tahun 2018 dilakukan kegiatan penanganan permasalahan kawasan hutan khususnya di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Dalam proses penanganan permasalahan kawasan hutan telah dilaksanakan kegiatan litigasi dan advokasi terhadap gugatan perdata, gugatan tata usaha negara maupun uji materiil terhadap produk perundang-undangan. Pembahasan-pembahasan dengan pakar hukum dan instansi lain guna menyelesaikan permasalahan dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan juga telah dilakukan. Kegiatan litigasi dan advokasi yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

1. Litigasi dan Advokasi di Lampung berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung dan Biro Hukum Sekjen KLHK.
2. Litigasi dan Advokasi di Denpasar berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar dan Biro Hukum Sekjen.
3. Litigasi dan Advokasi di Mataram dengan Dinas Kehutanan Mataram dan Biro Hukum Sekjen KLHK.
4. Litigasi dan Advokasi di Kupang dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIV Kupang dan Biro Hukum Sekjen KLHK.

Kegiatan Litigasi dan Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan pada Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai prosedur yang ada, dan permasalahan kawasan hutan dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hambatan pelaksanaannya adalah kurangnya SDM yang tersedia dibanding dengan jumlah permasalahan yang dihadapi. Ke depannya, penguatan koordinasi dengan instansi terkait akan terus diupayakan dan lebih fokus pada kegiatan.

Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra, capaian ini masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, yaitu penyegaran hukum. Selain itu di dalam Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdapat dua kegiatan yaitu litigasi dan advokasi.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 sebesar Rp 886.424.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 804.758.350,-.

Pengembangan dan Pemantauan Kerja Sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Pelaksanaan sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan yang dituangkan dalam rancangan kegiatan didukung penganggaran dalam bentuk APBN serta dari dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana lain yang tidak mengikat ini menjadi sumber dana alternatif yang dapat mengisi kekurangan dana APBN dalam membiayai kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas. Sumber dana alternatif tersebut diperoleh diantaranya melalui kerjasama bilateral/multilateral dengan beberapa negara donor melalui mekanisme pengajuan proposal proyek kepada pihak negara/lembaga/mitra donor. Kegiatan hibah kerjasama luar negeri di Ditjen PKTL pada Tahun 2018 adalah:

1. *Forest Investment Program (FIP) Proyek II “Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project”* yang merupakan kerjasama antara Ditjen PKTL dengan World Bank dengan jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Total hibah untuk FIP Proyek II ini sebesar US\$ 17.350.000. Tujuan proyek persiapan ini adalah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon serta memberikan manfaat lanjutan untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH). Kegiatan Proyek FIP II tahun 2018 antara lain pengelolaan KPH berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang yang disusun atau direvisi dengan partisipasi masyarakat dan penyusunan draft peraturan-peraturan penting yang melalui koordinasi yang lebih baik dan diajukan untuk ditinjau oleh pemerintah.
2. *Environment Support Program Phase III (ESP III)* yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Denmark melalui Danida dengan Pemerintah Indonesia melalui Bappenas, dengan *Focal Point* yang berada di lintas Kementerian, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas koordinasi dan tanggung jawab seluruh pelaporan kegiatan dan keuangan proyek berada pada Bappenas, sedangkan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) adalah sebagai koordinator program. Jumlah alokasi hibah keseluruhan proyek ESP III adalah *55,25 million Danish Kroner (DKK)* dengan jangka waktu 5 Tahun (2012-2017) dan diperpanjang sampai Tahun 2018. Perpanjangan ini disebabkan masih tersisanya pekerjaan di Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, namun demikian Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) sebagai koordinator

program ESP 3 KLHK tetap bertanggung jawab melaporkan perkembangan proyek. Kegiatan proyek ESP3 di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor antara lain : Memfasilitasi penyusunan dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri terkait KLHS; Memberikan pendampingan proses penyusunan KLHS RPJMD kepada daerah; Memberikan pendampingan proses penyusunan KLHS RZWP3K kepada daerah; Memberikan bimbingan teknis kepada daerah dalam peningkatan kapasitas SDM dalam proses penyusunan KLHS.

3. *Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan* merupakan kerjasama yang disponsori oleh *Global Environment Facility (GEF)* dengan *United Nation Development Program (UNDP)* sebagai lembaga pelaksana yang ditunjuk GEF dan Ditjen PKTL sebagai *Implementing Partner* melalui dokumen proyek yang telah ditandatangani pada akhir tahun 2017. Proyek ini akan dilaksanakan dalam periode 7 tahun (November 2017 – November 2024) dengan total hibah sebesar US\$ 9.000.000 yang bersifat hibah langsung terencana barang dan jasa non KPPN. Proyek ini bertujuan untuk menjaga keberadaan hutan di luar kawasan hutan termasuk keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem di Kalimantan. Tahun 2018 telah dilakukan beberapa kegiatan/meeting/workshop/FGD dalam rangka mendukung output project. Kegiatan tersebut antara lain :
 - a. *Kick off Meeting*
 - b. *Inception Workshop*
 - c. Proses Penyusunan TOR dan Rekrutmen Konsultan Pelaksana Penyusunan *Policy Paper* dan *Policy Brief* tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan di luar Kawasan yang menghasilkan 3 Seri Policy brief yaitu :
 - Seri 1 : Kebijakan Pengelolaan Hutan di APL
 - Seri 2 : Pendekatan Multipihak untuk Pengelolaan Hutan di APL
 - Seri 3 : Kebijakan Insentif yang Inovatif dalam Penyelamatan Hutan di APL
 - d. *Project Board Meeting*
 - e. *MOU dengan 3 Universitas dan kontrak Penyusunan Baseline di 4 Kabupaten target*
 - f. *Regional Workshop* di 3 Provinsi (Balikpapan, Pontianak dan Palangkaraya)
 - g. *FGD di 4 Kabupaten (Kutai Timur, Sintang, Ketapang dan Kotawaringin Barat)*
 - h. Pelaksanaan *Regional Workshop* tentang Mekanisme Insentif.

Hubungan kemitraan antara Indonesia dengan mitra internasional dan domestik diharapkan bersifat *mutual respect, mutual benefit, mutual understanding* dan dapat mendukung tugas fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Untuk dapat mewujudkannya, dilakukan pengembangan dan pemantauan kerja sama teknik serta asistensi penyusunan dan pengelolaan kerjasama.

Pengembangan kerjasama dilakukan melalui fasilitasi penyiapan materi Delegasi RI dalam sidang-sidang internasional serta pertemuan bilateral dan multilateral. Fasilitasi ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber informasi yang valid, terutama dari pihak yang menjalin kerjasama untuk diolah dan dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk informasi aktual mengenai kerjasama, saran dan pendapat yang positif terhadap pihak-pihak yang menjalin kerjasama dalam bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Beberapa kegiatan pengembangan kerjasama bilateral dan multilateral yang diikuti oleh Ditjen PKTL Tahun 2018 baik sebagai DELRI ataupun undangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka menghadiri *International Symposium on the Promotion of Deforestation Free Global Supply Chains* sebagai narasumber dari KLHK di Mita Conference Hall, Tokyo, Jepang 22-25 Januari 2018.
- b. Perjalanan dinas Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka menghadiri seminar kehutanan *Indonesia Changing Paradigm of Forestry Policy in Indonesia : Toward Promotion of Community-based Sustainable Forest Management* dan Pertemuan Bilateral Indonesia-Jepang di Tokyo, Jepang tanggal 27 dan 30 Juni 2018.
- c. Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka sebagai Delri pada 24^h *Session of Committee on Forestry*, Roma tanggal 14-20 Juli 2018.

Pemantauan kerjasama dilakukan terhadap kerjasama yang sedang dan atau telah dilakukan. Pemantauan kerjasama dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan kehutanan, khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Kegiatan pengembangan dan pemantauan kerjasama ini diharapkan berdampak terhadap percepatan pencapaian sasaran pembangunan kehutanan, khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Asistensi penyusunan dan pengelolaan kerja sama bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 19-20 Maret 2018 dengan tujuan untuk membangun kapasitas SDM lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Pusat dan UPT) serta Dinas Kehutanan Propinsi (KPH) agar memiliki kemampuan memadai di bidang pengelolaan hibah, termasuk dalam aspek administrasi, manajemen dan pelaporan. Kegiatan asistensi penyusunan dan pengelolaan kerjasama hibah merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat terdapat dua *project* yaitu FIP II dan ESP 3 di mana satker Ditjen PKTL bertindak sebagai *Executing Agency*. Persamaan persepsi terhadap pengelolaan kerja sama perlu ditingkatkan terutama para pelaksana *project* yang harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan asistensi ini perlu dilakukan secara berkala sebagai wadah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.

Apabila dibandingkan dengan target output dalam renstra, realisasi sampai dengan tahun 2018 relatif rendah. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang pada awalnya direncanakan di dalam Renstra, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Selain itu kegiatan pengembangan dan pemantauan kerjasama bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan di dalamnya terdapat 2 (dua) output kegiatan yaitu kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Pengembangan dan pemantauan kerjasama teknik bidang PKTL Tahun 2018 sebesar Rp 604.680.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 570.277.969,-.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kegiatan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang PKTL Tahun 2018 dilaksanakan lebih baik dengan mengacu pada prosedur, tata waktu dan peraturan yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait menjadi salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan. Outcomes yang dihasilkan antara lain:

- a. Pengelolaan kerjasama/hibah dapat terlaksana dengan baik dan laporan kegiatan hibah/kerjasama dapat terdokumentasi dengan baik.
- b. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menjadi narasumber dan delri pada siding-sidang internasional.

SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN merupakan aset negara yang memerlukan perencanaan, pengelolaan dan perawatan yang baik. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum yang di dalam pelaksanaannya mensinergikan antara fungsi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan akan memberikan kontribusi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.

Sebagai satuan kerja yang bertugas melakukan pengelolaan BMN dan memberikan pembinaan petugas SIMAK BMN seluruh satker lingkup Ditjen PKTL, pada tahun 2018 Setditjen PKTL telah melaksanakan penyusunan laporan barang milik negara (SIMAK-BMN) lingkup Ditjen PKTL, pembinaan administrasi pengelolaan perlengkapan dan penyelesaian hibah BMN Lingkup Ditjen PKTL.

Ditjen PKTL merupakan Unit Eselon I yang berkewajiban menghimpun dan mengungkapkan pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas mutasi BMN secara berjenjang, baik mutasi tambah maupun mutasi kurang yang terjadi pada masing-masing satker di lingkup Ditjen PKTL. Penyusunan laporan pertanggungjawaban BMN Tahun 2018 dilakukan dalam rangka mendukung Laporan BMN di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan SIMAK BMN Ditjen PKTL Tahun 2018 sebesar Rp 583.504.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 418.067.560,-. (71.65%). Rendahnya serapan anggaran pada sasaran kinerja ini disebabkan oleh: 1) pengangkutan BMN rusak hanya dapat dilaksanakan 13% dari pagu karena sesuai realitas BMN yang rusak, 2) lelang BMN hanya dapat dilaksanakan 19% dari pagu berupa lelang kendaraan Dinas, sedangkan lelang peralatan kantor tidak dilaksanakan karena sedang dalam pemeriksaan BPK-RI; 3) rendahnya

pelaksanaan kedua kegiatan pada poin 1) dan 2) berimplikasi langsung pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka inventarisasi, koordinasi, pengawalan, pengangkutan, penataan, dan proses penghapusan yang hanya dapat dilaksanakan 58%.

Pengelolaan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Ditjen PKTL adalah Unit eselon I yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam hal ini Setditjen PKTL.

Penyusunan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Penggunaan Anggaran Negara dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang direkonsiliasikan dengan KPPN melalui upload data ke sistem E-Rekon&LK, sehingga dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Pendapatan Negara dan Hibah.

Gambar 8. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan



Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2018 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.538.616.432.338,- atau mencapai 130% dari

estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 1.181.072.841.000,-. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 584.151.090.483,- atau mencapai 53% dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.100.434.984.000,-.(sumber: OMSPAN Per 31 Desember 2018, data diunduh pada 14 Januari 2019)

Nilai Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 812.958.607.925,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 9.633.857.527,-, Aset Tetap (netto) sebesar Rp 608.432.861.070,- dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 27.749.885.259,-, sedangkan Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 6.185.917.332,- dan Rp 806.772.690.593,-. (sumber: E-REKON Per 31 Desember 2018 data diunduh pada 14 Januari 2019). Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2018 menggambarkan telah terjadi surplus-LO sebesar Rp 2.172.141.219.104,-, sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 806.772.690.593,-. (sumber: E-REKON Per 31 Desember 2018 data diunduh pada 14 Januari 2019)

Dalam rangka mengkoordinasikan Laporan SAI dari masing-masing Satker (Pusat dan Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah I-XXII) serta untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala yang ada maka pada Tahun 2018 dilaksanakan bimbingan dan pembinaan SAI ke seluruh Satker terkait serta Penyusunan Laporan Keuangan yang diselenggarakan setiap Semester dengan melibatkan seluruh Satker lingkup Ditjen PKTL. Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan juga dilakukan untuk meningkatkan wawasan di bidang peraturan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Gambar 9. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perbendaharaan



Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.538.616.432.338,- atau mencapai 130 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar

Rp1.181.072.841.000,00. Pendapatan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagian besar terdiri dari Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan.

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,70 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah setoran PNBPKH dan bertambahnya wajib bayar (pemegang IPPKH) dari Penggunaan Kawasan Hutan dari pembayaran PNBPKH tahun berjalan, terutang tahun sebelumnya, kekurangan pembayaran hasil Berita Acara Verifikasi dan Pembayaran denda untuk piutang 2018 dan tahun sebelumnya.

Sebagai langkah untuk efisiensi penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan dan Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan dengan satuan kerja pusat dan daerah dilakukan dengan menggunakan fasilitas ruang rapat di dalam kantor, tanpa mengurangi output yang dihasilkan jika dibandingkan dengan pelaksanaan di luar kantor atau di hotel.

Permasalahan Perbendaharaan dan Laporan Keuangan yang ada pada satuan kerja diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melakukan bimbingan teknis ataupun dengan rapat koordinasi.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja kegiatan ini adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tingkat Eselon I, serta Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perbendaharaan. Outcome penting atas tercapainya output sasaran kinerja kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Eselon I dan II Tahunan dengan andal dan tepat waktu, Tersusunnya Laporan Keuangan Eselon I dan II Semesteran dengan andal dan tepat waktu, Terwujudnya pelaksanaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Upaya perbaikan yang akan terus diupayakan kedepannya dalam bentuk sosialisasi perbendaharaan kepada para pelaksana perbendaharaan sehingga terwujud pengeelolaan anggaran yang akuntabel.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Ditjen PKTL Tahun 2018 sebesar Rp 618.008.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 598.718.782,-.

Penyusunan TL-LHP

Dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada Ditjen PKTL, efektifitas pengawasan perlu ditingkatkan. Pengawasan dapat efektif jika temuan hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh Auditan sampai dengan selesai.

Tindak lanjut merupakan langkah perbaikan/penyempurnaan yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Kerja yang terkait sesuai rekomendasi/saran temuan hasil audit.

Gambar 10. Rapat Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal



Sebagai upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian temuan auditor, pada Tahun 2018 Setditjen PKTL melakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK, BPKP, ITJEN, WASMAS dan Kasus Kerugian Negara di seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Perkembangan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK RI Lingkup Ditjen PKTL sampai dengan Tahun 2018 tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Ditjen PKTL

| No | Tahun | Jumlah LHP | Temuan | Rekomendasi | Status Rekomendasi | |
|---------------|-------|------------|--------|-------------|--------------------|------------|
| | | | | | TUNTAS | BLM TUNTAS |
| BPK RI | | | | | | |
| 1 | 2007 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | 2008 | 6 | 14 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | 2009 | 9 | 39 | 62 | 50 | 12 |
| 4 | 2010 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | 2011 | 2 | 9 | 12 | 6 | 6 |
| 6 | 2012 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | 2013 | 3 | 18 | 23 | 19 | 4 |
| 8 | 2014 | 3 | 28 | 14 | 9 | 5 |
| 9 | 2015 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 |
| 10 | 2016 | 4 | 13 | 27 | 9 | 18 |
| 11 | 2017 | 1 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | 2018 | 1 | 3 | 14 | 10 | 74 |

| Inspektorat Jenderal | | | | | | |
|----------------------|------|----|----|-----|----|-----|
| 1 | 2008 | 1 | 9 | 17 | 16 | 1 |
| 2 | 2009 | 1 | 18 | 29 | 28 | 1 |
| 3 | 2010 | | | | | |
| 4 | 2011 | 1 | 14 | 23 | 22 | 1 |
| 5 | 2012 | 1 | 7 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | 2013 | 3 | 17 | 31 | 24 | 7 |
| 7 | 2014 | 3 | 16 | 28 | 24 | 4 |
| 8 | 2015 | 7 | 38 | 82 | 71 | 11 |
| 9 | 2016 | 9 | 49 | 96 | 68 | 28 |
| 10 | 2017 | 11 | 62 | 129 | 14 | 115 |
| 11 | 2018 | 7 | 33 | 84 | 61 | 23 |

Keterangan: Data di atas merupakan hasil uji nilai s.d. Desember 2018

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2018 masih terdapat 74 Rekomendasi LHP BPK RI yang belum tuntas, sedangkan LHP Inspektorat Jenderal sebanyak 23 Rekomendasi. Pelaksanaan rapat LHP dilaksanakan dengan rapat kantor dan di luar jam kerja sebagai langkah efisiensi penggunaan anggaran. Outcome utama kegiatan ini adalah terselesaikannya semua rekomendasi dari Auditor. Kondisi ini dapat dicapai ketika Auditan segera menindaklanjuti rekomendasi dari auditor. Keberhasilan dalam mengurangi Temuan atas pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal akan diupayakan ke depannya dengan sosialisasi peraturan pelaksanaan perbendaharaan.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut LHP Tahun 2018 sebesar Rp 186.368.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 169.632.929,-.

Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan

Ditjen PKTL membutuhkan dukungan administrasi maupun dukungan teknis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Lingkup Ditjen PKTL. Dukungan administrasi perkantoran di antaranya berupa kegiatan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan sangat dibutuhkan dalam melayani dan membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari organisasi. Secara rinci, kegiatan ketatausahaan meliputi beberapa aktivitas berupa: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan dukungan administrasi atas tugas-tugas pada Lingkup Ditjen PKTL, maka difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan terkait Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker. Dengan terfasilitasinya kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas di Lingkup Ditjen PKTL.

Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker pada Tahun 2018 dilakukan melalui penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan ketatausahaan dan penataan kearsipan, serta koordinasi pimpinan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diantaranya seringnya terjadi gangguan pada jaringan Sistem Informasi Kearsipan dan masih kurangnya SDM yang menangani kearsipan serta terbatasnya ruang penyimpanan naskah dinas/arsip.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sistem digital penatausahaan naskah dinas/persuratan, pengelolaan persuratan di Sekretariat Ditjen PKTL pada Tahun 2018 sesuai aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK) adalah sebagai berikut: surat masuk ke Direktur Jenderal PKTL sebanyak 11.058 berkas surat, dan surat keluar dari Direktur Jenderal PKTL sebanyak 2.741 berkas surat. Sedangkan surat yang masuk ke Sekretaris Ditjen PKTL selama Tahun 2018 sebanyak 2.811 berkas surat dan surat keluar sebanyak 5.336 berkas surat. Secara rinci rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2018 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2018

| No | Jenis Surat | Dirjen | Sekditjen |
|----------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Surat Masuk | 11.058 | 2.811 |
| 2 | Surat Keluar | 2.741 | 5.336 |
| | - Berita Acara Serah Terima Barang | 14 | 59 |
| | - Berita Acara Serah Terima Jabatan | 1 | 29 |
| | - Keputusan | 289 | 135 |
| | - Nota Dinas | 143 | 855 |
| | - Peraturan | 14 | 8 |
| | - Standar Operasional/Prosedur | - | 5 |
| | - Surat Dinas | 1.814 | 1.743 |
| | - Surat Edaran | 3 | - |
| | - Surat Ijin | - | 201 |
| | - Surat Keterangan | 4 | 135 |
| | - Surat Kuasa | - | 1 |
| | - Surat Panggilan | - | 3 |
| | - Surat Pengantar | - | 3 |
| | - Surat Perintah | 19 | 792 |
| | - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas | - | 39 |
| | - Surat Pernyataan Menduduki Jabatan | - | 30 |
| | - Surat Pernyataan Pelantikan | - | 27 |
| | - Surat Tugas | 208 | 653 |
| | - Surat Undangan | 180 | 680 |
| | - Surat Rahasia | 1 | 119 |
| | Jumlah 1 dan 2 | 13.799 | 8.147 |

Kegiatan pengelolaan dan penataan arsip yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 yaitu :

1. Fumigasi arsip yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 Desember 2018 di Kantor Ditjen PKTL Jl. Juanda 100 Bogor melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana, yaitu PT. Agree Mulia Utama. Arsip yang difumigasi adalah arsip dari Direktorat RPPWPH
2. Digitalisasi arsip/dokumen yaitu kegiatan alih media arsip/scan arsip sebagai upaya penyelamatan dokumen . Terdapat 5.290 lembar dokumen yang discan dari rencana 5.000 lembar dokumen. Arsip tersebut selanjutnya disimpan dalam 13 keping CD.

Kegiatan rekonstruksi arsip dinamis yang telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2015, pada tahun 2018 kembali dilaksanakan. Sebanyak 18.899 berkas arsip direkonstruksi dengan bantuan tenaga arsiparis dari Biro Umum Setjen KLHK dan selanjutnya telah diserahkan ke Unit Pusat Kearsipan Cimanggis Depok untuk penyimpanan.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan Tahun 2018 sebesar Rp 1.095.654.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.021.863.992,-.

Layanan internal (overhead)

Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengadaan yang dilaksanakan pada awal tahun dengan pagu anggaran sebesar Rp 378.901.000 antara lain berupa pembelian laptop, komputer, printer, proyektor, scanner, mesin penghancur kertas dan AC split. Proses pengadaan baru dapat dimulai dengan e-catalogue pada Bulan Februari dan selesai pada Bulan April. Seluruh belanja modal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Seiring dengan dinamika kebijakan yang terjadi, pada Bulan November 2018 dilakukan revisi anggaran dan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 4.338.700.000,- untuk penambahan pengadaan peralatan dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan operasional Ditjen PKTL, sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 4.717.601.000,-. Dari anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp 4.371.995.591,-. Seluruh rencana tambahan pengadaan dapat dilaksanakan sesuai rencana e-catalogue tanpa dijumpai kendala yang berarti. Apabila dibandingkan dengan penyediaan layanan internal tahun sebelumnya, volume output pada Tahun 2018 jauh lebih besar yaitu sebanyak 120 unit.

Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran terdiri dari dua kelompok kegiatan, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

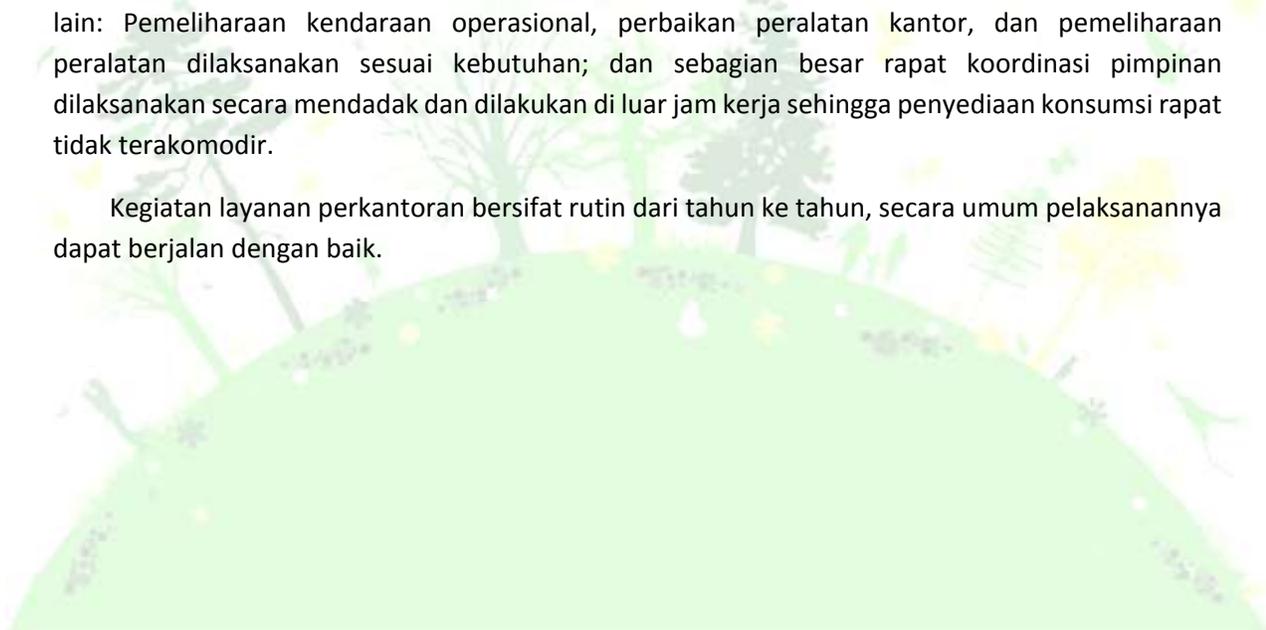
Pembayaran Gaji dan Tunjangan di Setditjen PKTL dilakukan untuk pegawai Satker Pusat lingkup Ditjen PKTL dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2010 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2018 terdapat kelebihan pengalokasian belanja pegawai pada DIPA Setditjen PKTL. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 50.761.114.000,-, hingga akhir tahun anggaran dapat terserap sebesar Rp 45.217.365.887,- (89,08%).

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang dilakukan sepanjang Tahun 2018 bersifat rutin, antara lain adalah pengadaan pakaian kerja pesuruh/supir/satpam, perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, pengadaan perlengkapan kantor (barang cetakan, alat RT, dan langganan majalah), perawatan kendaraan roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, operasional pelaksanaan satker, operasional pimpinan dan perkantoran, serta operasional unit layanan pengadaan (ULP).

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Tahun 2018 sebesar Rp 3.342.323.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.942.295.324,- (88,03%). Permasalahan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran antara lain: Pemeliharaan kendaraan operasional, perbaikan peralatan kantor, dan pemeliharaan peralatan dilaksanakan sesuai kebutuhan; dan sebagian besar rapat koordinasi pimpinan dilaksanakan secara mendadak dan dilakukan di luar jam kerja sehingga penyediaan konsumsi rapat tidak terakomodir.

Kegiatan layanan perkantoran bersifat rutin dari tahun ke tahun, secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.



3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Setditjen PKTL Tahun 2018 adalah sebesar Rp 68.605.187.000,- dengan capaian sebesar Rp 61.391.499.761,- atau 89,49%. Alokasi anggaran Tahun 2018 lebih besar dibandingkan alokasi anggaran Tahun 2017. Alokasi anggaran Tahun 2017 adalah sebesar Rp 62.165.336.000,- dengan capaian Rp 55.498.852.588,- atau 89,28%. Kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen PKTL Tahun 2018 meningkat dari aspek persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan Tahun 2017.

Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2018

| NO | PPK | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Bag. Program & Evaluasi | 3.153.151.000 | 2.742.510.874 | 86,98 |
| 2 | Bag. Hukum & Kerjasama Teknik | 2.086.290.000 | 1.941.422.822 | 93,06 |
| 3 | Bag. Kepegawaian, Ortala | 2.061.144.000 | 1.855.995.141 | 90,05 |
| 4 | Bag. Keuangan & Umum | 5.825.857.000 | 5.260.219.115 | 90,29 |
| 5 | Layanan Internal (overhead) | 4.717.601.000 | 4.373.985.922 | 92,72 |
| 6 | Gaji | 50.761.144.000 | 45.217.365.887 | 89,08 |
| TOTAL | | 68.605.187.000 | 61.391.499.761 | 89,49 |

Meskipun realisasi anggaran secara persentase keseluruhan terlihat rendah, namun tidak berpengaruh pada capaian output organisasi. Seluruh output yang direncanakan dapat dicapai. Capaian realisasi keuangan relatif rendah disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Terdapat anggaran belanja pegawai yang tidak dapat diserap sebesar Rp 5.543.778.113,- atau 8,08% dari total pagu anggaran.
- Efisiensi penggunaan anggaran pada perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kerjasama sebesar Rp 30.966.500,- .
- Pemeliharaan kendaraan operasional, perbaikan peralatan kantor, dan pemeliharaan peralatan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 174.727.127,- yang tidak digunakan untuk efisiensi.
- Sebagian besar rapat koordinasi pimpinan dilaksanakan secara mendadak dan dilakukan di luar jam kerja sehingga penyediaan konsumsi rapat tidak terakomodir dan menyisakan anggaran sebesar Rp 87.421.000,-.
- Pengadaan peralatan dan sarana penunjang kegiatan operasional Ditjen PKTL dapat diselesaikan secara fisik, namun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 343.615.078,-.

BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Setditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2018 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 77 poin**. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2018 dilakukan pada Tahun 2019, sehingga pencapaian target ini belum dapat terukur.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2017 yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar **75,29 dengan kategori BB (sangat baik)**. Kategori tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Hasil evaluasi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 71,25. Realisasi hasil penilaian Tahun 2017 ini berada di atas target yang telah ditetapkan sebesar 75 point. Gambaran target dan realisasi nilai implementasi SAKIP disajikan pada gambar 11.

Gambar 11. Perkembangan nilai implementasi SAKIP Ditjen PKTL



Sebagai unit organisasi yang mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen, Setditjen PKTL telah mengkoordinasikan untuk secara bersama menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP Tahun 2017. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2017.
- Membuat pedoman/SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja lingkup Ditjen PKTL.

- c. Melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Direktorat IPSDH Tahun 2017.
- d. Melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Direktorat RPPWPH Tahun 2017.
- e. Mempublikasikan Laporan Kinerja Direktorat PPKH Tahun 2017 dan menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan berikutnya.
- f. Melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2017.
- g. Penyelarasan perencanaan kinerja tahunan Direktorat PDLUK dengan Renstra.
- h. Dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan laporan Kinerja Lingkup Satker Pusat dan Eselon I beserta penyempurnaannya telah dipublikasikan melalui website <http://pktl.menlhk.go.id>.

Apabila melihat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) khusus pada satker Setditjen PKTL, nilai yang didapatkan sebesar **83,27 dengan kategori A (memuaskan)**. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterima, tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KLHK untuk ditindaklanjuti. Kendati demikian, berbagai rekomendasi umum yang menjadi catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK untuk satker lain di Lingkup Ditjen PKTL tetap menjadi perhatian untuk menghindari pengulangan kesalahan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang, sehingga nilai SAKIP sebesar 78 yang menjadi target di tahun 2019 dapat tercapai.



BAB V PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Setditjen PKTL untuk mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Setditjen PKTL sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja yang sama dengan Tahun 2017 yaitu sebesar 100% atau nilai rasio efektivitas sebesar 1. Hal yang sama juga tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran yang menunjukkan nilai rasio efisiensi sebesar 1,10.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Setditjen PKTL sebagai salah satu Eselon II pada Ditjen PKTL yang menyelenggarakan kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan” telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik walaupun masih ditemukan kekurangan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Setditjen PKTL, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Ditjen PKTL kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2018. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Setditjen PKTL yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP. 19581030 198203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

| No. (1) | Sasaran (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78,00 (A) di Tahun 2019. | Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point); target tahun 2018 sebesar 77 point : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ▪ Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ▪ Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ▪ Penyusunan Laporan SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum | 77 Point |
| | | | 3 Kegiatan |
| | | | 3 Kegiatan |
| | | | 3 Kegiatan |
| | | | 4 Kegiatan |
| | | Layanan Internal (overhead) | 1 Layanan |
| | | Layanan Perkantoran | 1 Layanan |

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Anggaran

Rp. 63.990.316.000,- (*enam puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan,



Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP. 19581030 198203 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ary Sudijanto, MSE
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, MSE
NIP. 19681011 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

| No. (1) | Sasaran (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78,00 (A) di Tahun 2019. | Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point); target tahun 2018 sebesar 77 point : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ▪ Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ▪ Penyusunan/ pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ▪ Penyusunan Laporan SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum Layanan Internal (overhead) Layanan Perkantoran | 77 Point 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Layanan 1 Layanan |

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Anggaran

Rp. 68.605.187.000,- (*enam puluh delapan milyar enam ratus lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan,

Ir. Ary Sudijanto, MSE
NIP. 19681011 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Triyono Saputro, M.MSI.
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Evaluasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2018

Pihak Kedua,

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP. 19581030 198203 1 004

Pihak Pertama,

Ir. Triyono Saputro, M.MSI.
NIP. 19660619 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

| Sasaran (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|---|--|---------------|
| Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 4 Dokumen |
| Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 6 Dokumen |
| Data dan Informasi, Statistik dan Terselenggaranya Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Terselenggaranya Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 3 Dokumen |
| Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Bagian Program dan Evaluasi) | Tersedianya Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Bagian Program dan Evaluasi) | 1 Layanan |

Kegiatan Bagian Program dan Evaluasi
 Jumlah Anggaran Rp. 2.245.829.000,- (*Dua Milyar Dua Ratus Empat Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Jakarta, Februari 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan,



Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
 NIP. 19581030 198203 1 004

Kepala Bagian Program dan
 Evaluasi,



Ir. Triyono Saputro, M.M.SI.
 NIP. 19660619 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endi Sugandi, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2018

Pihak Kedua,

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP. 19581030 198203 1 004

Pihak Pertama,

Endi Sugandi, S.H., M.H.
NIP. 19651123 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK

| Sasaran (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|---|---|---------------|
| Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 5 Dokumen |
| Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 1 Dokumen |
| Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 2 Dokumen |
| Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik) | Tersedianya Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik) | 1 Layanan |

Kegiatan Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,
 Jumlah Anggaran Rp. 1.854.182.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Jakarta, Februari 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan,

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
 NIP. 19581030 198203 1 004

Kepala Bagian Hukum dan
 Kerjasama Teknik,

Endi Sugandi, S.H., M.H.
 NIP. 19651123 199803 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Sylvia Febriyanti, S.E, M.M.
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawalan, Organisasi dan Tata Laksana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2018

Pihak Kedua,

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP. 19581030 198203 1 004

Pihak Pertama,

Ari Sylvia Febriyanti, S.E, M.M.
NIP. 19760216 199903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

| Sasaran (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|--|--|---------------|
| Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Dokumen Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 1 Dokumen |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian | Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen |
| Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM | Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM | 1 Dokumen |
| Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana) | Tersedianya Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana) | 1 Layanan |

Kegiatan Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,
 Jumlah Anggaran Rp. 1.651.189.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Jakarta, Februari 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan,



Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
 NIP. 19581030 198203 1 004

Kepala Bagian Kepegawaian,
 Organisasi dan Tata Laksana,



Ari Sylvia Febriyanti, S.E, M.M.
 NIP. 19760216 199903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. R. Noer Hidayah Poernamasari
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Umum
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2018

Pihak Kedua,

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP. 19581030 198203 1 004

Pihak Pertama,

Dra. R. Noer Hidayah Poernamasari
NIP. 19640803 199103 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

| Sasaran (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|--|--|------------------|
| SIMAK-BMN | Laporan SIMAK-BMN | 3 Dokumen |
| Pengelolaan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Tersusunnya Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 3 Dokumen |
| Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan | Dokumen Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan | 1 Dokumen |
| Penyusunan TL-LHP | Laporan Penyusunan TL-LHP | 1 Dokumen |
| Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Bagian Keuangan dan Umum) | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Bagian Keuangan dan Umum) | 1 Layanan |
| Layanan Perkantoran | Layanan perkantoran | 12 Bulan Layanan |

Kegiatan Bagian Umum dan Keuangan.
 Jumlah Anggaran Rp. 58.239.116.000,- (*Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah*)

Jakarta, Februari 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan,

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
 NIP. 19581030 198203 1 004

Kepala Bagian Keuangan dan
 Umum

Dra. R. Moer Hidayah Poernamasari
 NIP. 19640803 199103 2 001



Sekretariat Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270